

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Republik Indonesia Serikat di bulan Desember 1949 mewarisi keadaan ekonomi yang kocar-kacir akibat perang kemerdekaan yang berlangsung kurang lebih empat tahun. Warisan ekonomi kolonial dengan struktur yang membuat Indonesia menjadi bergantung pada ekonomi dunia, pemerintahan Indonesia ingin mengubah menjadi ekonomi nasional. Walaupun Indonesia mendapatkan kedaulatan, tetapi pada hasil kesepakatan KMB, Indonesia tetap diberi batasan tertentu karena dalam kesepakatan tersebut masih mempertahankan struktur ekonomi kolonial yang membuat Indonesia terbatas dalam mengambil langkah untuk membangun ekonomi nasional yang mandiri.¹

Konflik yang terjadi antara Indonesia dan Belanda diakhiri dengan adanya kesepakatan yang dicapai dalam KMB di akhir tahun 1949. Adanya langkah ini, Indonesia dapat memperoleh pengakuan resmi di dunia internasional sebagai negara berdaulat.² Dalam hal lainnya, Indonesia juga harus menanggung beban hutang yang terjadi semasa pemerintahan Hindia-Belanda sampai tahun 1949. Termasuk biaya-biaya untuk keperluan militer sewaktu terjadinya pemberontakan di masa itu.³ Seperti negara yang baru merdeka lainnya, Indonesia memiliki permasalahan yang mendasar

¹ Tom Gunadi, *Ekonomi dan Sistem Ekonomi Menurut Pancasila dan UUD 45*, (Bandung: Percetakan ANGKASA, 1995), hlm. 362-363.

² Boediono, *Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah*. (Jakarta: Mizan, 2016). Hlm. 83.

³ Ajip Rosidi, *Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT* (Jakarta: PT. Inti Idayu Press, 1986), hlm. 243.

khususnya pada perekonomian. Banyak kesulitan dalam bidang keuangan yang dihadapi oleh pemerintah yang baru itu, yang harus segera diselesaikan.⁴

Indonesia dihadapkan pada kenyataan yaitu adanya kerusakan berat pada sarana dan prasarana produksi, birokrasi pemerintahan yang belum mapan dan belum berjalan dengan baik, beban utang yang harus ditanggung sebagai konsekuensi dari kesepakatan KMB, kemudian konstelasi kekuasaan ekonomi dan kemampuan ekonomi antar kelompok sosial yang tidak jauh berbeda dengan masa kolonial dahulu.⁵ Keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk, ekonomi nasional boleh dikatakan mengalami stagflasi. Defisit saldo neraca pembayaran dan defisit keuangan pemerintah sangat besar, kegiatan produksi disektor pertanian dan sektor industry manufaktur praktis terhenti, kemudian tingkat inflasi sangat tinggi.⁶

Saat itu mata uang yang beredar di Indonesia ada tiga jenis, yaitu uang *De Javasche Bank*, uang NICA, dan ORI. Hal tersebut mempengaruhi situasi ekonomi Indonesia yang saat itu sedang terpuruk karena utang menumpuk, inflasi tinggi terus menerus terjadi, dan harga barang dan jasa melambung, serta cadangan devisa yang kian menyusut.⁷ Syafruddin Prawiranegara selaku Menteri Keuangan pada saat itu, sadar bahwa perlu adanya tindakan drastis yang dilakukan. Maka dari itu dilakukan

⁴ *Ibid*, hlm. 244.

⁵ Boediono, *Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah*. (Jakarta: Mizan, 2016). Hlm. 87.

⁶ Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia Beberapa Isu Penting*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 16.

⁷ Joseph, "Redominasi dan Sanering Mata Uang Rupiah (IDR) : Analisis Komparasi", *Jurnal EBBANK* (Vol. 6, No. 1, Juli 2015), hlm. 96.

penyehatan moneter, karena hanya dengan cara itu harapan untuk mengembangkan ekonomi dapat dilakukan.⁸

Pada tanggal 18 Maret 1950 dikeluarkanlah Undang-Undang Darurat tentang pinjaman darurat yang memberi kuasa kepada Menteri Keuangan untuk mengambil segala tindakan untuk mengadakan pinjaman bagi negara Republik Indonesia Serikat dan untuk mewajibkan turut serta dalam pinjaman sedemikian itu, lagipula untuk mengeluarkan peraturan-peraturan tentang peredaran uang.⁹ Kemudian munculah upaya dalam bidang moneter yang disebut dengan “Gunting Syafruddin” melalui SK MENKEU RIS No. PU/1 pada pasal 5, sebagai Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara mengambil keputusan untuk memotong 2 uang NICA dan uang *De Javasche Bank* dengan gunting dari pecahan Rp 5 keatas. Tetapi, uang ORI tidak digunting. Kebijakan ini mulai berlaku pada pukul 8 malam tanggal 19 Maret 1950.¹⁰ Bagian kiri uang tetap menjadi alat pembayaran yang sah hingga tanggal 22 Maret 1950, kemudian harus ditukarkan dengan uang baru, bila uang tersebut tidak ditukarkan hingga waktu yang ditentukan maka uang tersebut sudah tidak laku lagi sebagai alat pembayaran. Sedangkan bagian kanan dari uang yang digunting dapat ditukarkan dengan surat obligasi pemerintah sebesar dari nominal uang tersebut. obligasi ini dinamakan Obligasi Pinjaman Darurat 1950, dengan besaran bunga 3% setahun.

⁸ Ajip Rosidi, *Syafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT* (Jakarta: PT. Inti Idayu Press, 1986), hlm. 246.

⁹ UNDANG-UNDANG DARURAT (UUDRT) NOMOR 13 TAHUN 1950 (13/1950) Tentang Pinjaman Darurat, Pasal 1.

¹⁰ Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Serikat No. P.U./1, Pasal 5.

Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengurangi jumlah uang yang beredar serta menekan inflasi dan menurunkan harga barang, yang juga akan mengisi kas pemerintah dengan pinjaman wajib yang kemungkinan akan mencapai Rp 1,5 M.¹¹ Kebijakan tersebut merupakan kebijakan moneter paling fenomenal selama periode ekonomi liberal di Indonesia.¹² Kebijakan ini menimbulkan reaksi yang pro dan kontra dalam masyarakat. Awal berlakunya kebijakan gunting Syafruddin masyarakat hilang kepercayaan terhadap uang dan membelajakan uangnya dengan membeli barang walaupun harganya tinggi. Hingga sampai pada titik barang-barang membludak sedangkan yang membeli tidak ada, kemudian harga barang jatuh, mereka yang memiliki barang mencoba menjual barang tersebut sesuai dengan penawaran yang pas agar tidak terlalu rugi. Harga barang yang merosot cukup mengejutkan golongan pedagang. Tetapi setelah adanya penurunan harga barang, keadaan pasar menjadi lebih normal, masyarakat kembali menaruh kepercayaan pada uang.¹³

Suasana kehidupan di tahun 1950 juga diwarnai dengan kebebasan jurnalis dalam menerbitkan pers. Dapat dikatakan bahwa siapapun yang memiliki uang, tidak peduli dari kelompok manapun atau menganut ideologi politik apapun, tanpa harus mendapat izin dari siapapun, dapat menerbitkan pers, terutama surat kabar. Sementara itu, pemerintah Indonesia sendiri mendorong penerbitan dengan memberikan bantuan modal, subsidi untuk kertas koran, peralatan percetakan dan langganan untuk setiap surat kabar terbitan (Sjahril & Sjureich, 1971: 127). Upaya pemerintah tersebut terkait

¹¹ Ajip Rosidi, *op.cit.*, 250-254.

¹² Departemen Keuangan, *Rupiah di Tengah Rentang Sejarah: 45 Tahun Uang Republik Indonesia 1946-1991* (Jakarta: Yayasan Tridaya Warga Kejaksaan RI, 1996) hlm. 13.

¹³ Ajip Rosidi, *op.cit.*, 256-257.

dengan kebutuhan untuk memperoleh informasi dan pandangan yang kondusif bagi kepentingan dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam kondisi pers Belanda dan Cina yang masih berkembang pesat, yang mengekspresikan suara dan orientasi politiknya.¹⁴

Tanggapan masyarakat terhadap kebijakan gunting Syafruddin, dapat terlihat dari berbagai berita koran-koran se zaman. Koran merupakan suatu media yang dibutuhkan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam kehidupan bernegara. Pemerintah mengharapkan mendapatkan dukungan dalam menjalankan program dan kebijakan, sementara itu masyarakat juga ingin tahu program dan kebijakan pemerintah yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan.¹⁵ Koran dapat dikatakan sebagai salah satu institusi sosial yang penting dan berfungsi dalam memberikan berita dan opini kepada masyarakat dan pemerintah. Karena fungsi tersebut, seringkali koran dan media pers lainnya dianggap sebagai kekuatan demokrasi ke empat, di samping lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.¹⁶

Beberapa koran yang ada pada tahun 1950 yaitu, *Pedoman*, *Persatuan*, *Suara Masyarakat*, *Waspada* dan lainnya. Koran *Pedoman* terbit harian di Jakarta sejak 29 November 1948, koran *Persatuan* terbit harian di Bandung sejak tahun 1946, *Suara Masyarakat* terbit harian di Malang sejak Mei 1950, dan koran *Waspada* terbit harian sejak 11 Januari 1947 di Medan. Dengan adanya koran-koran tersebut, tersebarlah

¹⁴ Andi Suwirta, "Dinamika Kehidupan Pers di Indonesia pada Tahun 1950-1965: Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab Nasional", *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan* 1 (2), 2008, hlm 49.

¹⁵ Dodi Prasetya A., "Sejarah Keberadaan dan Peranan Media di Tanah Air", diakses dari (www.kompasiana.com/amp/prasetya247/sejarah-keberadaan-dan-peranan-media-di-tanah-air_5511894fa33311ae4eba7e34) pada tanggal 30 November 2020 pukul 21.28WIB.

¹⁶ Andi Suwirta, "Dinamika Kehidupan Pers di Indonesia pada Tahun 1950-1965: Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab Nasional", *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan* 1 (2), 2008, hlm 48.

informasi mengenai peristiwa sehari-hari yang terjadi, termasuk pada saat kebijakan pengguntingan uang diumumkan melalui saluran radio, yang kemudian dituliskan di koran. Koran-koran yang terbit saat itu aktif memberikan gambaran situasi masyarakat di Indonesia setelah berlakunya kebijakan pengguntingan uang dan informasi mengenai rencana perekonomian dan lainnya yang dirancang oleh pemerintah.

Dipilihnya kebijakan moneter “Gunting Syafruddin” sebagai upaya menghadapi masalah ekonomi pada saat itu dengan benar-benar menggunting uang menjadi daya tarik tersendiri, selain itu tindakan yang diambil oleh pemerintah ini bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar pada saat itu dan penyamarataan mata uang. Kebijakan gunting Syafruddin menjadi kebijakan yang kontroversial, diawal kebijaksanaan ini berlaku masyarakat hilang kepercayaan pada uang, tetapi setelah beberapa hal terjadi, kebijakan ini mampu membuat masyarakat menaruh kepercayaan kembali pada uang. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana pemberitaan mengenai kebijakan gunting Syafruddin pada koran-koran periode 1950. Penelitian ini memusatkan perhatian terhadap bagaimana eksese yang ditimbulkan oleh kebijakan gunting Syafruddin khususnya pada bidang sosial-ekonomi melalui berita koran-koran sezaman. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis memberi judul penelitian ini **“Kebijakan Gunting Syafruddin Dan Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Masyarakat Indonesia: Sebuah Analisis Berita Koran-Koran (Maret-Agustus 1950)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Kebijakan Ekonomi Gunting yang dapat dibilang berhasil lantaran bisa menambal defisit yang diperkirakan sebesar Rp 2,65 milyar, menjadi lebih jauh lebih

sedikit dari yang diperhitungkan. Dengan adanya kebijakan tersebut membuat orang-orang menaruh kembali kepercayaannya pada uang dan membuat kedudukan uang menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengetahui mengapa kebijakan tersebut dikeluarkan, kebijakan di bidang moneter yaitu kegiatan pemotongan nilai uang atau “sanering”, yang pada waktu itu dikenal dengan “gunting Syafruddin”. Untuk menjawab permasalahan pokok tersebut, diajukan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang terdiri dari:

1. Apa yang melatarbelakangi munculnya kebijakan gunting Syafruddin 1950?
2. Bagaimana pemberitaan mengenai kebijakan gunting Syafruddin yang dimuat pada koran-koran sezaman?
3. Apa dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan dari dilaksanakannya kebijakan gunting Syafruddin yang dimuat dalam berita koran-koran sezaman?
4. Apa kebijakan gunting Syafruddin mampu menjaga inflasi di Indonesia dan berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap uang berdasarkan berita koran-koran sezaman?

Pada penelitian ini periode yang diambil dimulai dari bulan Maret 1950 karena pada bulan tersebut dikeluarkanlah kebijakan gunting Syafruddin sesuai dengan SK Menteri Keuangan Republik Indonesia Serikat No. P.U./1, meskipun seperti itu terdapat penjelasan-penjelasan yang sedikit diulas pada bulan-bulan sebelum diberlakukannya kebijakan tersebut. Pada bulan Agustus 1950 merupakan masa saat Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan diubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, bulan ini dijadikan batas akhir periode penelitian ini.

1.3. Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini bertujuan untuk, mengetahui bagaimana pemberitaan mengenai kebijakan gunting Syafruddin yang dimuat diberbagai koran sezaman. Kemudian menjabarkan bagaimana dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan dari dilaksanakannya kebijakan gunting Syafruddin. Selain itu juga menjelaskan bagaimana kebijakan gunting Syafruddin itu dapat menjaga inflasi di Indonesia dan membuat masyarakat menaruh kembali kepercayaan terhadap uang. Penjabaran dan penjelasan didapatkan dari Koran-koran periode 1950, yang kemudian dianalisis.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperkaya topik penelitian di dalam jurusan sejarah. Menambah referensi topik penelitian tentang sejarah kebijakan ekonomi khususnya dalam ekonomi moneter. Serta memberikan informasi mengenai dampak dari kebijakan gunting Syafruddin dilihat dari tahun diberlakukannya kebijakan tersebut.

1.4. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan kebijakan gunting Syafrudin sudah banyak dilakukan. Cukup banyak buku dan artikel yang ditulis dengan tema kebijakan gunting Syafruddin. Sebelumnya telah ada tulisan mengenai studi ini Menurut buku “Sejarah Bank Indonesia Periode 1: 1945-1959”, berdasarkan indeks tahun 1938 yang dianggap sebagai masa keseimbangan moneter, Pemerintah menargetkan agar uang yang beredar pada tahun 1950 hanya sekitar Rp2,5 miliar. Jumlah ini adalah enam kali lipat dari posisi uang yang beredar pada 1938 yang sebesar Rp420 juta.¹⁷ Situasi ekonomi dan

¹⁷ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *CATATAN OEANG DAN KILAS BALIK KEBIJAKAN. MEDIAKEUANGAN TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL*. Vol XII/ No. 121/ Oktober 2017 hlm. 20.

pemerintahan yang berbeda mempengaruhi langkah atau kebijakan yang diambil untuk mengatasi kondisi negara , maka dari itu perbedaan penelitian ini ada pada batasan temporalnya.

Kemudian, tulisan Ajip Rosidi¹⁸ dalam salah satu bab di buku “Syafuruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT” yang membahas kebijakan Gunting Syafruddin. Dalam tulisan tersebut banyak menjelaskan bagaimana kebijakan gunting Syafruddin memberikan dampak yang signifikan terhadap golongan pedagang yang ada di Jakarta Kota. Pada penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana reaksi masyarakat Indonesia setelah berlakunya kebijakan gunting Syafruddin.

Boediono dalam bukunya yang berjudul “Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah (2016)”,¹⁹ menjabarkan beban ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia di tahun 1950 setelah mendapatkan kedaulatan dari Belanda. Pada penelitian ini, penulis menarik kilas balik beban ekonomi yang ditanggung oleh Indonesia sebelum tahun 1950 yang akan menjadi cikal bakal mengapa diambilnya kebijakan gunting Syafruddin.

Tom Gunadi menulis dalam bukunya yang berjudul “Ekonomi dan Sistem Ekonomi Menurut Pancasila dan UUD 45 (1995)”²⁰ Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, dijalankanlah “Gunting Syafruddin” pada tanggal 19 Maret 1950. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menurunkan nilai uang kertas NICA dan uang *De*

¹⁸ Ajip Rosidi, *Syafuruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT* (Jakarta: Inti Idayu Press, 1986) .

¹⁹ Boediono, *Ekonomi Indonesia: Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Mizan, 2016).

²⁰ Tom Gunadi, *Ekonomi dan Sistem Ekonomi Menurut Pancasila dan UUD 45*, (Bandung: Percetakan ANGKASA, 1995).

Javasche Bank diatas 2,50 gulden menjadi setengah harganya. Maka, Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara waktu itu menentukan bahwa uang yang bernilai 2,50 gulden ke atas dipotong menjadi dua dan hanya sebelah saja yang dinyatakan berlaku setengahnya. Penulis ingin mengetahui mengapa pada kebijakan gunting Syafruddin hanya dua jenis mata uang yang dipotong menjadi dua, sedangkan pada saat itu ada tiga jenis mata uang yang berlaku.

Setelah diakui sebagai negara yang berdaulat Indonesia mengharapkan sistem ekonomi yang sebelumnya merupakan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, Tulus Tambunan dalam bukunya yang berjudul “Perekonomian Indonesia: Beberapa Isu Penting” menyinggung bahwa faktor dari terjadinya stagflasi pada ekonomi nasional disebabkan oleh salah satunya manajemen ekonomi makro yang sangat jelek.²¹ Kebijakan gunting Syafruddin yang dikatakan berhasil mencapai target disesuaikan sepanjang kebijakan tersebut dilaksanakan, pada penelitian ini ingin mencari tahu dampak dari kebijakan gunting Syafruddin yang dilakukan pada orde lama yang pada buku Tulus Tambunan dikatakan memiliki manajemen ekonomi makro yang tidak baik.

Pham Van Thuy dalam bukunya *Beyond Political Skin: Colonial to National Economies in Indonesia and Vietnam 1910s-1960s*, buku ini menguraikan bagaimana keadaan Indonesia di saat mempertahankan kemerdekaan dan saat Indonesia menjadi negara serikat, dalam buku ini melihat situasi tersebut dari sisi pemerintahan,

²¹ Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia Beberapa Isu Penting*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000).

bagaimana pemerintah mengambil tindakan untuk negara serta masalah yang ada dalam pemerintahan itu sendiri.

Perekonomian Indonesia mengenai hasil produksi pada saat mempertahankan kemerdekaan dapat dilihat dari buku Anne Booth yang berjudul “*The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Centuries: A History of Missed Opportunities*”. Buku ini jelas memberikan table-tabel mengenai hasil produksi indonesi di saat mempertahankan kemerdekaan, tabel hasil produksi yang ada di dalam buku dapat dijadikan perbandingan untuk penelitian ini.

Dalam buku Hadi Soesastro,dkk yang berjudul “Buku I (1945-1959) Membangun Ekonomi Nasional”, membahas mengenai keadaan Indonesia melalui sudut pandang politik yang dihubungkan dengan Undang-undang dan kesepakatan yang terjalin antara Indonesia dan Belanda. Pada penelitian ini, penulis ingin melihat tema penelitian ini dari sudut pandang sejarah yang difokuskan pada bidang sosial-ekonomi keadaan Indonesia di bulan Maret-Agustus 1950.

1.5. Kerangka Analisis

Penelitian ini termasuk ke dalam sejarah sosial-ekonomi serta menggunakan analisis wacana. Sejarah sosial ekonomi menurut Kuntowijoyo mempunyai bahasan yang sangat luas dan beragam. Kebanyakan sejarah sosial mempunyai hubungan erat dengan sejarah ekonomi, sehingga menjadi sebuah kajian sejarah sosial ekonomi²². Kajian sejarah sosial ekonomi meliputi aspek-aspek sosial dan ekonomi dari suatu masyarakat. Di dalam penelitian ini, untuk mengungkapkan ekses yang ditimbulkan

²² Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994).

dari berlakunya kebijakan Gunting Syafruddin melalui berita koran-koran sezaman, dilakukan melalui pendekatan analisis wacana. Analisis wacana digunakan untuk mendapatkan dan memahami jawaban dari rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Analisis wacana merupakan suatu metode untuk mengkaji wacana yang terdapat di dalam pesan-pesan komunikasi secara tekstual ataupun konseptual. Digunakannya analisis wacana untuk melihat bagaimana pesan-pesan diorganisasikan, digunakan, dan dipahami. Pada penelitian ini digunakan analisis wacana dengan pendekatan sosiokultural, yang lebih memfokuskan pada praktik sosial kehidupan manusia, dan meletakkan wacana sebagai bentuk tindakan manusia.²³ Oleh karena itu, analisis wacana dipilih sebagai cara untuk mengungkapkan tanggapan masyarakat terhadap kebijakan gunting Syafruddin yang diberlakukan oleh pemerintah di dalam wacana yang dimuat dalam berita koran-koran.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya) atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Dalam ekonomi, kebijakan merupakan suatu usaha pemerintah untuk mengatur dan mengawasi pertumbuhan dan aktivitas ekonomi dalam negaranya.

Ekonomi makro merupakan sebuah ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian sebuah negara secara keseluruhan. Makro ekonomi dapat digunakan

²³ Hamad, "Lebih Dekat dengan Analisis Wacana", *Jurnal MediaTor* (Vol. 8, No. 2, Desember 2007), hlm. 326.

untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tenaga kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkesinambungan. Hubungan yang dipelajari dalam ekonomi makro adalah hubungan kausal antara variable-variable aggregative.²⁴

Menurut Nur Aini (2015), kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Hampir semua sektor ekonomi kapitalis terkait dengan sistem Bunga sehingga sector moneter lebih cepat berkembang daripada sector riil. Hal ini disebabkan karena sector moneter lebih cepat memberikan keuntungan daripada sector riil. Salah satu instrumen dari kebijakan moneter adalah sanering.

Sanering merupakan tindakan pemerintah yakni pemotongan daya beli masyarakat melalui pengurangan nilai mata uang, tetapi harga barang tetap, maka akan berakibat turunnya daya beli masyarakat. Tindakan ini pemerintah ini pernah dilakukan di Indonesia yang dikenal dengan sebutan “Gunting Syafruddin”. Hal ini dilakukan untuk mengatasi situasi ekonomi Indonesia yang saat itu sedang terpuruk karena utang yang menumpuk, inflasi yang tinggi terus terjadi, dan harga barang serta jasa yang melambung tinggi. Dengan tindakan ini pemerintah sekaligus bertujuan mengurangi

²⁴ Thamrin, *Konsep Dasar Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi*. (Jakarta: Kemenristekdikti RI)

jumlah uang yang beredar, menekan inflasi, dan menurunkan harga barang, dan meningkatkan likuiditas kas pemerintah.²⁵

Inflasi yaitu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus atau *continue* berkaitan dengan mekanisme pasar dalam waktu yang panjang. Hal ini terjadi dikarenakan dalam inflasi akan terjadi penurunan tingkat pendapatan.²⁶ Dengan kata lain inflasi itu menurunnya nilai mata uang secara berkelanjutan. Bank Indonesia mendefinisikan neraca pembayaran Indonesia (NPI) atau *balance of payments* sebagai catatan statistik atas transaksi ekonomi antara penduduk Indonesia dan nonpenduduk Indonesia yang dihitung dalam periode tertentu.²⁷ Keadaan perekonomian Indonesia pada saat itu mengalami inflasi, kemudian neraca pembayaran Indonesia pada saat itu mengalami defisit saldo.²⁸

Berdasarkan pengertian di atas, kebijakan gunting Syafruddin suatu rangkaian konsep yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai suatu harapan dalam mengatur dan mengawasi perekonomian dalam negara sebagai langkah dalam menghadapi kondisi perekonomian negara.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Metode sejarah merupakan proses menguji serta menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.

²⁵ Joseph, "Redonominasi dan Sanering Mata Uang Rupiah (IDR) : Analisis Komparasi", *Jurnal EBBANK* (Vol. 6, No. 1, Juli 2015), hlm. 96.

²⁶ Bambang Wijayanta dan Aristanti Vidyarningsih. *Ekonomi&Akutansi : Mengasah Kemampuan Ekonomi*. (Bandung: Citra Praya)

²⁷ Lestari Ningsih, *Apa itu Neraca Pembayaran Indonesia?*. Diakses dari <https://www.wartaekonomi.co.id/read224343/apa-itu-neraca-pembayaran-indonesia> pada tanggal 22 Februari 2020 pukul 22.45WIB

²⁸ Defisit adalah kurangnya kas keuangan negara. Dengan neraca kata lain pengeluaran lebih banyak daripada penerimaan.

Setelah melakukan metode sejarah, kemudian dilakukan pula proses historiografi, yaitu proses rekonstruksi imajinatif dari masa lalu berdasarkan data yang diperoleh, yang nantinya dipersatukan dengan metode sejarah.²⁹ Dalam metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahap yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Tahap pertama yaitu heuristik atau pengumpulan sumber tertulis, pada tahap ini sumber-sumber yang dicari adalah sumber primer dan sekunder.

Dalam tahap heuristik, kegiatan pengumpulan sumber tertulis primer maupun sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun sumber primer yang didapatkan penulis adalah berupa Undang-Undang Darurat (UUDRT) Nomor 13 Tahun 1950 (13/1950), Putusan Menteri Keuangan No. P.U. 1 dan 2, dan kumpulan surat kabar periode 1950. Kemudian data yang dijadikan sebagai sumber sekunder diantaranya adalah Phạm Văn Thuỷ dengan judul *Beyond Political Skin: Colonial to National Economies in Indonesia and Vietnam 1910s-1960s*; Anne Booth dengan judul *The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Centuries*; Boediono dengan judul *Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah*; Hadi Soesastro,dkk dengan judul *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir buku I (1945-1959)*; beberapa jurnal mengenai kebijakan ekonomi gunting Syafruddin; dan lain-lain. Dengan digunakannya sumber sekunder, tambahan dapat yang didapatkan untuk mengkaji permasalahan yang diajukan.

Selanjutnya, tahapan kedua yaitu kritik sumber, tahapan ini dibagi menjadi dua bagian yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern bertujuan untuk melihat

²⁹ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: UI Press, 1969). Hlm. 39.

apakah data-data yang digunakan asli atau tidak melalui fisik dari data tersebut, sedangkan kritik intern bertujuan untuk memastikan kebenaran dari isi data tersebut untuk memperoleh fakta-fakta yang berkaitan dengan topik penelitian. Penulis lebih banyak menggunakan surat kabar periode 1950 untuk sumber primer, maka dari itu penulis lebih mudah menguji keautentikan sumber untuk proses kritik eksternal. Setelah itu menilai kredibilitas para penulis buku yang dipakai penulis. Pada proses ini penulis menggunakan buku Anne Booth, Thee Kian Wie, dan Boediono yang telah banyak menulis mengenai perekonomian Indonesia. Proses kritik internal, penulis tidak mendapatkan hambatan karena sumber sekunder yang dipakai oleh penulis saling mendukung satu sama lain.

Tahapan ketiga yaitu interpretasi, setelah sumber cukup memadai, selanjutnya melakukan interpretasi, penafsiran makna fakta dan hubungan antara satu fakta dengan fakta yang lainnya dengan sikap obyektif. Tahapan historiografi, merupakan tahap akhir dalam penulisan metode sejarah. Menyusun fakta secara kronologis dan sistematis, lalu menjadi tulisan sejarah sebagai kisah. Penulisan yang menjadi tujuan akhir pada sebuah studi sejarah.

1.7. Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulisan ini dibagi menjadi empat bab, setiap bab memiliki keterkaitan dan merupakan satu kesatuan yang utuh.

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, kerangka analisis, metode penelitian dan terakhir sistematika penulisan.

Bab dua memuat perekonomian Indonesia sebelum tahun 1950, kemudian latar belakang munculnya kebijakan gunting Syafruddin.

Bab tiga memuat pokok-pokok masalah dalam penulisan ini. Dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan dari kebijakan gunting Syafruddin, kemudian bagaimana kebijakan gunting Syafruddin mampu menjaga inflasi di Indonesia dan membuat masyarakat Indonesia menaruh kembali kepercayaannya terhadap uang.

Bab empat adalah penutup dari seluruh bab yang ada pada penulisan ini yang didalamnya berisikan kesimpulan dari seluruh bab.

